ANALISIS PRIORITAS KRITERIA DAN PENANGANAN DAERAH PERMUKIMAN KUMUH MENGGUNAKAN *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS* DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

(Tesis)

Oleh

ALHADI PRATAMA BINTANG
1725011025

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ANALISIS PRIORITAS KRITERIA DAN PENANGANAN DAERAH PERMUKIMAN KUMUH MENGGUNAKAN *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS* DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Oleh
ALHADI PRATAMA BINTANG
1725011025

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER TEKNIK SIPIL

Pada

Magister Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

ANALISIS PRIORITAS KRITERIA DAN PENANGANAN DAERAH PERMUKIMAN KUMUH MENGGUNAKAN *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS* DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Oleh

Alhadi Pratama Bintang

Salah satu masalah yang sering timbul dalam proses pengembangan wilayah perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah masalah kekumuhan. Diperlukan penanganan yang efektif dan efisien terhadap masalah permukiman kumuh tersebut. Salah satunya dengan melakukan analisis prioritas kriteria permukiman kumuh dalam rangka penanganan daerah kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk itu dilakukan penelitian dalam menentukan sub kriteria yang paling prioritas pada daerah kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta menentukan daerah kumuh yang menjadi prioritas penanganan dibanding daerah kumuh lain. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dan kuisioner terhadap 25 responden dengan kriteria khusus, maka diperoleh sub kriteria paling prioritas di Kelurahan Daya Murni adalah Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan, di Kelurahan Mulya Asri adalah Kualitas Konstruksi Drainase, di Kelurahan Panaragan Jaya adalah Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air, Di Tiyuh Pulung Kencana adalah Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis, di Tiyuh Bandar Dewa adalah Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum dan Di Tiyuh Menggala Mas adalah Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis. Selain itu diperoleh hasil bahwa Kelurahan Daya Murni merupakan daerah kumuh yang memerlukan penanganan lebih dibandingkan daerah kumuh lainnya.

Kata Kunci : Kriteria Prioritas, Permukiman Kumuh, *Analytic Hierarchy Process*

ABSTRACT

THE ANALYZING OF PRIORITY CRITERIA AND HANDLING OF SLUM AREAS USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS IN TULANG BAWANG BARAT DISTRICT

By :

Alhadi Pratama Bintang

One of the most common problems in the process of developing residential areas in Tulang Bawang Barat District is slums. An effective and efficient handling of the problem of slum settlements is needed. One of them is by analyzing the priority criteria for slum settlements in the context of handling slum areas in Tulang Bawang Barat District. Therefore, research was conducted to determine the most priority sub-criteria in slum areas in Tulang Bawang Barat and to determine which slum areas were the priority for handling compared to others. In this study, the analysis was carried out using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Based on the analysis of the results of interviews and questionnaires to 25 respondents with special criteria, the most priority sub-criteria in Daya Murni Village is Non-compliance with Building Technical Requirements, in Mulya Asri Village is Quality of Drainage Construction, in Panaragan Jaya Village is Inability to Flow Water Runoff, In Pulung Kencana Village, the waste management system is not in accordance with technical standards, in Bandar Dewa Village is the Unavailability of Safe Access to Drinking Water and in Menggala Mas Village, the infrastructure and facilities for waste water management are not in accordance with technical standards. In addition, the results obtained that the Daya Murni Village is a slum area that requires more handling than others.

Key Words : Priority Criteria, Slum Areas, *Analytic Hierarchy Process*

Judul Tesis	: **ANALISIS PRIORITAS KRITERIA DAN PENANGANAN DAERAH PERMUKIMAN KUMUH MENGGUNAKAN *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS* DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**
Nama Mahasiswa	: **Alhadi Pratama Bintang**
No. Pokok Mahasiswa	: 1725011025
Progam Studi	: Magister Teknik Sipil
Fakultas	: Teknik

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Utama	Pembimbing Anggota
Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T.	**Vera A. Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.**
NIP. 19741004 200003 2 002	NIP. 19740831 200003 2 002

Ketua Progam Studi Magister Teknik Sipil

Dr. Ir. Endro P. Wahono, S.T., M.Sc.
NIP. 19700129 199512 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T.** .....

   Sekretaris : **Vera A. Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Dr. Dyah Indriana K, S.T., M.Sc.** .....

2. Dekan Fakultas Teknik

   Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
   NIP 19750928 200112 1 002

3. Direktur Progam Pascasarjana

   Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
   NIP 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **22 Desember 2021**

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa sesungguhnya tesis yang saya susun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Teknik pada Progam Pascasarjana Magister Teknik Sipil seluruhnya adalah benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini, saya kutip dari hasil penulisan orang lain yang sumbernya dituliskan dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Tesis dengan judul "Analisis Prioritas Kriteria dan Penanganan Daerah Permukiman Kumuh Menggunakan *Analytic Hierarchy Process* Di Kabupaten Tulang Bawang Barat" dapat diselesaikan berkat bimbingan dan motivasi dari pembimbing-pembimbing saya, yaitu:

1. Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T.
2. Vera A. Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kedua dosen pembimbing dan Bapak/ Ibu Dosen Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan motivasi.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis yang saya buat ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

pung, Desember 2021

Alhadi Pratama Bintang
NPM: 1725011025

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Mei 1993, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Erwanuddin, S.T. dan Ibu Dra. Hj. Wabaroza, M.Pd. Penulis memiliki satu saudara perempuan bernama Jenni Karina Bintang. Penulis memulai pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Melati Puspa Bandar Lampung pada tahun 1997, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Tanjung Senang pada tahun 1998-2004, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2004-2007, kemudian Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2007-2010. Pada tahun 2010-2015 penulis menyelesaikan studi sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. Lalu pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung.

Selain menjadi Mahasiswa, penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada tahun 2021 penulis melakukan penelitian pada bidang

pengembangan wilayah dan kota dengan judul tugas akhir "Analisis Prioritas Kriteria dan Penanganan Daerah Permukiman Kumuh Menggunakan *Analytic Hierarchy Process* Di Kabupaten Tulang Bawang Barat" dibawah bimbingan Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. dan Ibu Vera A. Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.

Bandar Lampung, Desember 2021
Penulis

ALHADI PRATAMA BINTANG

PERSEMBAHAN

Alhamdulilahhirabbilalamin, Kuucapkan Syukur atas Karunia Allah SWT dan dengan Segala Kerendahan Hati meraih Ridho Illahi Robbi dan Syafaat Nabi Muhammad SAW Kupersembahkan karya Kecilku ini untuk orang-orang yang aku sayangi

Ayah dan Ibuku

Kedua orang tua, Bapak Erwanuddin dan Ibu Wabaroza atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayang yang tidak ada putusnya

Istri dan Anakku

Istriku Indah Damayanti dan Anakku Aqmar Daniswara Bintang yang menjadi motivasi dan sumber inspirasi dalam setiap kegiatanku

Suadara Perempuanku

Untuk adik perempuanku, yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas dan kewajibanku ini

Dosen Teknik Sipil

Yang selalu membimbing, mengajarkan, memberikan saran serta saran baik secara akademis maupun non akademis

Sahabat-sahabatku

Yang selalu membantu, memberikan semangat, mendukung menuju keberhasilan, serta saling berbagi cerita suka duka dalam perjuangan menuju kesuksesan.

MOTTO

Angin Tidak Berhembus Untuk Menggoyangkan Pepohonan Melainkan Menguji Kekuatan Akarnya
-Ali Bin Abi Thalib-

Gagal Hanya Terjadi Jika Kita Menyerah
-Bacharuddin Jusuf Habibie-

Throw Me To The Wolves And I Will Return Leading The Pack
-Katniss Everdeen-

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillahirobbilalamin, Penulis haturkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan mempersembahkan judul *"Analisis Prioritas Kriteria dan Penanganan Daerah Permukiman Kumuh Menggunakan Analytic Hierarchy Process Di Kabupaten Tulang Bawang Barat"* dengan sebaik-baiknya.

Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan seluruh alam Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah diatas jalan agama islam hingga hari ajal menjemput.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapat bimbingan, motivasi dan bantuan baik moral maupun materi oleh banyak pihak. Untuk itu, dengan sepenuh ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M. Si, Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Lampung.
4. Ibu Ir. Laksmi Irianti, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Ir. Endro P. Wahono, S.T., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing utama tesis, yang banyak memberikan waktu, ide pemikiran dan semangat serta motivasi bagi penulis.
7. Ibu Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D. selaku pembimbing kedua tesis, yang telah banyak memberikan waktu, pengalaman, motivasi dan pemikiran bagi penulis.
8. Ibu Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc. selaku dosen penguji utama yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ibu Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.Sc. selaku dosen penguji kedua sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan kritik, saran dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Dosen Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Lampung berkat ilmu yang telah diajarkan kepada penulis selama penulis menjalani masa studi di perkuliahan.
11. Staff Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung yang telah banyak membantu kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Seluruh teman-teman Program Studi Magister Teknik Sipil Unila angkatan 2017 untuk kebersamaan yang telah dijalani. Tiada kata yang dapat penulis utarakan untuk mengungkapkan perasaan senang dan bangga menjadi bagian dan juga beban dari angkatan 2017.
13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata sedikit harapan penulis semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin..

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2021
Penulis,

Alhadi Pratama Bintang

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR ix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Batasan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kawasan Permukiman Kumuh 9
B. Kriteria Permukiman Kumuh 11
C. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 18
D. *Analytic Hierarchy Proses* (AHP) 19
E. Penelitian Terdahulu 24

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian 27
B. Jenis Data 28
C. Prosedur Penelitian 29
D. Diagram Alir Metode Penelitian 31

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 33
B. Pembahasan 65

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 77
B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Tingkat Kepentingan Elemen..... 22

Tabel 2.2 Contoh Matriks Berpasangan..... 23

Tabel 2.3 Random Indeks AHP 24

Tabel 3.1 Kuesioner Pembobotan Kriteria Permukiman Kumuh 29

Tabel 4.1 Matriks Perbandingan Sub kriteria 36

Tabel 4.2 Nilai Eigen Pada Matriks Sub Kriteria 37

Tabel 4.3 Penjumlahan dan Rerata Nilai Eigen 38

Tabel 4.4 Pembobotan Analisis Kawasan Permukiman Kumuh..... 39

Tabel 4.5 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Ketidakteraturan Bangunan Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 40

Tabel 4.6 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Ketidakteraturan Bangunan..... 40

Tabel 4.7 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Tingkat Kepadatan Bangunan Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 41

Tabel 4.8 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Tingkat Kepadatan Bangunan 42

Tabel 4.9 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 42

Tabel 4.10 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 43

Tabel 4.11 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 44

Tabel 4.12 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan..... 44

Tabel 4.13 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 45

Tabel 4.14 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan 45

Tabel 4.15 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 46

Tabel 4.16 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum 47

Tabel 4.17 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 47

Tabel 4.18 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 48

Tabel 4.19 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 49

Tabel 4.20 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 49

Tabel 4.21 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Ketidaktersediaan Drainase Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 50

Tabel 4.22 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Ketidaktersediaan Drainase 50

Tabel 4.23 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 51

Tabel 4.24 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase 52

Tabel 4.25 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Tidak Terpeliharanya Drainase Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 52

Tabel 4.26 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Tidak Terpeliharanya Drainase 53

Tabel 4.27 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 54

Tabel 4.28 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kualitas Konstruksi Drainase 54

Tabel 4.29 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 55

Tabel 4.30 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis..... 55

Tabel 4.31 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 56

Tabel 4.32 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis..... 57

Tabel 4.33 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 57

Tabel 4.34 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Standar..... 58

Tabel 4.35 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 59

Tabel 4.36 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis 59

Tabel 4.37 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 60

Tabel 4.38 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana 60

Tabel 4.39 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 61

Tabel 4.40 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 62

Tabel 4.41 Matriks Perbandingan Sub Kriteria Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Terhadap Daerah Kumuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat 62

Tabel 4.42 Nilai Eigen dan Nilai Rata-rata Sub Kriteria Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 63

Tabel 4.43 Perangkingan dari perbandingan sub kriteria dengan alternatif 63

Tabel 4.44 Prioritas Penanganan Daerah Permukiman Kumuh di Kab. Tulang Bawang Barat 66

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Hirarki AHP 20

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat 28

Gambar 3.2 Diagram Alir Metode Penelitian 32

Gambar 4.1 Hierarki Kriteria dan Sub Kriteria Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat 34

Gambar 4.2 Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul 67

Gambar 4.3 Sempadan Saluran Irigasi Tidak Bertanggul 68

Gambar 4.4 Kondisi Eksisting di Kelurahan Daya Murni 69

Gambar 4.5 Contoh Bentuk Saluran Drainase 70

Gambar 4.6 Kondisi Eksisting di Kelurahan Mulya Asri 71

Gambar 4.7 Kondisi Eksisting di Kelurahan Panaragan Jaya 72

Gambar 4.8 Kondisi Eksisting di Tiyuh Pulung Kencana..... 73

Gambar 4.9 Kondisi Eksisting di Tiyuh Bandar Dewa 74

Gambar 4.10 Kondisi Eksisting di Tiyuh Menggala Mas 75

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengembangan wilayah perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu pekerjaan utama yang dilaksanakan hampir diseluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjelaskan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pekerjaan rumah yang utama untuk dilaksanakan pada setiap daerah, khususnya pada daerah yang sedang berkembang.

Salah satu daerah yang sedang berkembang adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kabupaten ini berada di Provinsi Lampung yang merupakan pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang pada 29 Oktober 2008. Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada 04’10”-04’42” LS dan 104’55”-105’20” BT. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji dan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten

Lampung Tengah dan Lampung Utara serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagardewa, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Way Kenanga dan Kecamatan Batu Putih. Sebagai Kabupaten yang sedang berkembang, Kabupaten Tulang Bawang menyimpan banyak potensi untuk dikembangkan, baik potensi alamnya, sumber daya manusia, pertanian, perindustrian, perumahan dan kawasan permukiman, dan sebagainya. Salah satu masalah yang sering timbul dalam proses pengembangan suatu daerah khususnya pada pengembangan perumahan permukiman dan pembangunan perkotaan adalah masalah kekumuhan. Permukiman kumuh merupakan isu utama yang cukup pelik, hal ini dikarenakan upaya penanganan yang selama ini telah dilakukan selalu berbanding lurus dengan munculnya kawasan permukiman kumuh yang baru. Berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/56/II.04/HK/TUBABA/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat, ada enam daerah permukiman kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu di Kelurahan Daya Murni, Kelurahan Mulya Asri, Kelurahan Panaragan Jaya, Tiyuh Pulung Kencana, Tiyuh Bandar Dewa dan Tiyuh Menggala Mas.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya permukiman kumuh khususnya bagi pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang Barat adalah timbulnya paradigma negatif terhadap penyelengaraan pemerintahan, timbul kesan ketidakmampuan pemerintah dalam urusan pelayanan kehidupan dan

penghidupan masyarakatnya. Padahal, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pencegahan timbulnya kawasan permukiman kumuh baru dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh harus dilaksanakan dimulai dari akarnya.

Berdasarkan hal di atas, dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh harus direncanakan dengan matang agar tidak terjadi kemunculan daerah-daerah permukiman kumuh yang baru. Terlebih lagi dengan keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib mengefisiensikan anggaran untuk pengentasan permukiman kumuh agar lebih efektif. Salah satunya dengan melakukan analisis prioritas kriteria permukiman kumuh untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh sehingga pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, terdapat beberapa kriteria yang berpengaruh dalam pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh yaitu meliputi kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan limbah, kondisi pengelolaan persampahan, serta kondisi pencegahan kebakaran.

Terdapat beberapa sistem pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk mengetahui kriteria yang paling prioritas untuk ditindaklanjuti dalam rangka

pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh diantaranya yaitu *Simple Additive Wighting* (SAW) dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP). SAW atau yang biasa disebut kombinasi pembobotan linier merupakan metode pengambilan keputusan yang sederhana, metode ini didasarkan pada rata-rata pembobotan (Pramudhita, 2018). Konsep dasar metode SAW menurut Wicaksono, dkk (2019) adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Sedangkan AHP menguraikan permasalahan dengan banyak faktor atau banyak kriteria yang kemudian menghasilkan sebuah hierarki. Hierarki ini di artikan sebagai sebuah gambaran dari permasalahan yang banyak dalam suatu struktur banyak level, dimana pada level pertama adalah menentukan tujuan yang akan dicapai, kemudian diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya sampai level terakhir sehingga mendapatkan alternatif yang diinginkan (Pahtoni, 2020). AHP digunakan sebagai alat untuk memahami masalah kompleks yang akan diuraikan ke dalam elemen – elemen yang disusun secara hirarkis dan akhirnya melakukan penilaian terhadap elemen – elemen tersebut dan menentukan keputusan apa yang akan diambil (Prihatini, 2015).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Hal ini disebabkan karena AHP adalah suatu model/sistem pengambilan keputusan yang berguna dan fleksibel untuk membantu dalam menentukan prioritas dan membuat keputusan terbaik. Selain itu, metode AHP memiliki keunggulan dibandingkan sistem pengambilan keputusan yang lain karena mampu memberikan informasi yang lebih akurat. Menurut Idris (2012), pada AHP dilakukan perbandingan berpasangan antara kriteria satu dengan kriteria yang lain

serta subkriteria satu dan subkriteria yang lain. Hasil perbandingan berpasangan dibagi dengan jumlah elemen yang ada, sehingga diperoleh nilai prioritas dari setiap kriteria dan subkriteria yang dimaksud. Selanjutnya, nilai prioritas dikalikan dengan nilai keadaan alternatif untuk mendapatkan nilai akhir.

Berangkat dari permasalahan diatas, dilakukan penelitian mengenai analisis Prioritas Kriteria Permukiman Kumuh Menggunakan *Analytic Hierarchy Process* Di Kabupaten Tulang Bawang Barat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar bobot dari kriteria utama permukiman kumuh yang berpengaruh terhadap penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah dianalisis menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*)?
2. Sub kriteria mana yang paling prioritas penanganannya terhadap enam daerah permukiman kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
3. Daerah permukiman kumuh mana yang paling diprioritaskan penanganannya setelah dianalisis menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis besar bobot kriteria utama permukiman kumuh dengan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*).
2. Untuk menganalisis sub kriteria yang paling dominan dalam rangka prioritas penanganan di enam daerah permukiman kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Untuk menganalisis daerah permukiman kumuh mana yang paling diprioritaskan penanganannya dengan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*).

D. Batasan Masalah Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesuai dengan judul penelitian, maka diberikan beberapa Batasan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Daerah Permukiman Kumuh Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung sesuai dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/56/II.04/HK/TUBABA/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu di Kelurahan Daya Murni, Kelurahan Mulya Asri, Kelurahan Panaragan Jaya, Tiyuh Pulung Kencana, Tiyuh Bandar Dewa dan Tiyuh Menggala Mas.

2. Menurut Mutaqin, dkk (2019) terdapat 3 pilar pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh yaitu faktor fisik infrastuktur lingkungan, faktor kegiatan sosial dan faktor ekonomi. Pada penelitian ini difokuskan pada faktor fisik lingkungan dikarenakan Kabupaten Tulang Bawang Barat sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur.
3. Penelitian ini mempertimbangkan tujuh kriteria utama permukiman kumuh dan sembilan belas sub kriteria permukiman kumuh.
4. Tujuh kriteria utama permukiman kumuh yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan limbah, kondisi pengelolaan persampahan, serta kondisi pencegahan kebakaran.
5. Sembilan belas utama sub kriteria permukiman kumuh yaitu ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan, ketidaktersediaan akses aman air minum, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, ketidaktersediaan drainase, ketidakterhubungan dengan sistem drainase, tidak terpeliharanya drainase, kualitas konstruksi drainase, sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai standar teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya

sarana dan prasarana, ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran, ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.

6. Sistem Pengambilan Keputusan perhitungan pembobotan kriteria prioritas permukiman kumuh menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai bahan masukan dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang sudah ada yang lebih efektif dan efisien ditengah keterbatasan anggaran.
2. Bagi masyarakat khususnya sebagai acuan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan agar wilayah permukiman setempat tidak menjadi permukiman kumuh dan tidak muncul permukiman kumuh yang baru di wilayah sekitar.
3. Bagi aspek keilmuan akan memberikan tambahan informasi dalam bidang pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman masyarakat.

`

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kawasan Permukiman Kumuh

Pengertian permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Masih menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pengertian kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Menurut Djemabut (1977), permukiman adalah kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan. Pemukiman tersebut juga memberikan ruang gerak sumber daya dan pelayanan bagi peningkatan mutu kehidupan serta kecerdasan warga penghuni, yang berfungsi sebagai ajang kegiatan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Permukiman terbentuk dari kesatuan kata isi dan wadah, yaitu kesatuan antara manusia sebagai penghuni (isi) dengan lingkungan hunian

(wadah) akan membentuk suatu komunitas yang secara bersamaan dapat membentuk suatu permukiman yang mempunyai dimensi yang sangat luas, dimana batas dari permukiman biasanya berupa batasan geografis yang ada dipermukaan bumi, misalnya suatu wilayah atau benua yang terpisah karena lautan (Maretta dkk, 2019).

Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 286.162 jiwa yang terdiri atas 146.355 jiwa penduduk laki-laki dan 139 807 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk lakilaki terhadap penduduk perempuan sebesar 105. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 mencapai 238 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 9 kecamatan cukup beragam. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020 terhadap tahun 2010 adalah sebesar 0,013% setiap tahunnya (BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2021). Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat saat ini berdampak pada berbagai bidang diantaranya di bidang fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang memerlukan ketersediaan prasarana dan sarana dasar yang secara umum akan bersifat susul menyusul dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurang tersedianya sarana dasar ini akan mengakibatkan tumbuhnya beberapa bagian wilayah menjadi kawasan kumuh.

Kawasan yang kumuh, sering diidentikkan dengan kawasan yang jorok dengan masalah atau kemiskinan yang tinggi. Menurut Wiarni, dkk (2018), kawasan kumuh merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor, penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk ventilasi cahaya,

udara, sinitasi, dan lapangan terbuka). Kondisi yang ada seringkali menimbulkan dampak yang membahayakan bagi kehidupan manusia (misalnya kebakaran dan kriminalitas) sebagai akibat kombinasi berbagai faktor (Hariyanto, 2007).

Terdapat beberapa karakteristik kawasan permukiman di Indonesia yang menggambarkan suatu kawasan permukiman yang secara fisik memiliki kondisi lingkungan yang tidak layak seperti kotor, tercemar, lembab, dan lain-lain. Kondisi tersebut secara ekologis timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan daya dukung lingkungan mengatasi beban aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Hutapea (2012) mengatakan penyebab adanya permukiman kumuh adalah Karakter bangunan yaitu umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat, serta karakter lingkungan yaitu tidak ada *open space* (ruang terbuka hijau) dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga, kepadatan penduduk yang tinggi, sarana prasarana yang tidak terencana dengan baik.

B. Kriteria Permukiman Kumuh

Mengacu pada Undang – Undang No.1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengelolaan.

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, terdapat beberapa kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang digunakan

untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria tersebut meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

1. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:

a. Ketidakteraturan Bangunan

Merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. (Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2011).

b. Tingkat Kepadatan Bangunan Yang Tinggi Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Rencana Tata Ruang

Merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan/atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), seperti pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan (Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2011).

c. Ketidaksesuaian Terhadap Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:

1) pengendalian dampak lingkungan;
2) pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum;
3) keselamatan bangunan gedung;
4) kesehatan bangunan gedung;
5) kenyamanan bangunan gedung; dan
6) kemudahan bangunan gedung.

Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada dokumen perizinan tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2014 Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

2. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

a. Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan Perumahan atau Permukiman.

Merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman yang tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk

Merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

3. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:

a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Setiap Individu Sesuai Standar Yang Berlaku

Merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

4. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

a. Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan

Merupakan kondisi dimana terjadi genangan air dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

b. Ketidaktersediaan Drainase

Merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

c. Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan

Merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

d. Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair di Dalamnya

Merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan dengan baik dikarenakan tidak adanya pemeliharaan rutin dan/atau pemeliharaan berkala.

e. Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk

Merupakan kondisi dimana konstruksi drainase berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

5. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis Yang Berlaku

Merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

6. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

1) tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
2) tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
3) gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
4) tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

b. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) pewadahan dan pemilahan domestik;
2) pengumpulan lingkungan;
3) pengangkutan lingkungan; dan
4) pengolahan lingkungan.

c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Sehingga Terjadi Pencemaran Lingkungan Sekitar oleh Sampah, Baik Sumber Air Bersih, Tanah Maupun Jaringan Drainase.

Merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa pemeliharaan rutin; dan/atau pemeliharaan berkala.

7. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan sebagai berikut:

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

Merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:

1) pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);
2) jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam
3) kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi;
4) sarana komunikasi yang terdiri dari alat -alat yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada Instansi Pemadam Kebakaran; dan/atau
5) data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi:

1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
2) kendaraan pemadam kebakaran;
3) mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau
4) peralatan pendukung lainnya.

C. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

1. di atas air;
2. di tepi air;
3. di dataran rendah;
4. di perbukitan; dan
5. di daerah rawan bencana.

Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air :

Perumahan kumuh dan perm ukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa,sungai ataupun laut.

2. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air :

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (s ungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.

3. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah :

Perumahan kumuh dan perm ukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng kurang dari 10%.

4. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan :

Perumahan kumuh dan perm ukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng lebih dari 10 % dan kurang dari 40%

5. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana :

Perumahan kumuh dan perm ukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

D. *Analytic Hierarchy Process* (AHP)

AHP merupakan salah satu sistem pengambilan keputusan yang memiliki keunggulan dibandingkan sistem pengambilan keputusan yang lain. Menurut Pahtoni dan Tasrif (2020), hal ini disebabkan proses penentuan keputusan dengan metode ini dilakukan dengan terstruktur, melakukan bobot penilaian kepentingan sebanyak dua kali dan hasil dari perhitungan dapat dijadikan acuan dalam proses penentuan keputusan. Sedangkan menurut Idris (2012), metode AHP mampu memberikan informasi yang lebih akurat, karena pada metode AHP prosesnya dilakukan perbandingan berpasangan antara kriteria dan kriteria serta subkriteria dan subkriteria. AHP menuntun ke suatu perkiraan menyeluruh tentang kebaikan dan keburukan setiap alternatif, mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dan berbagai faktor, dan memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan dalam pengambilan keputusan (Maharani, 2017).

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki (Saaty, 1993). Hirarki didefenisikan sebagai suatu representasi dari sebuah kasus permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi tingkat dimana tingkat pertama adalah tujuan, yang diikuti tingkat faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga ingkat terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalan akan tampak lebih terstruktur serta sistematis seperti pada Gambar 2.1.

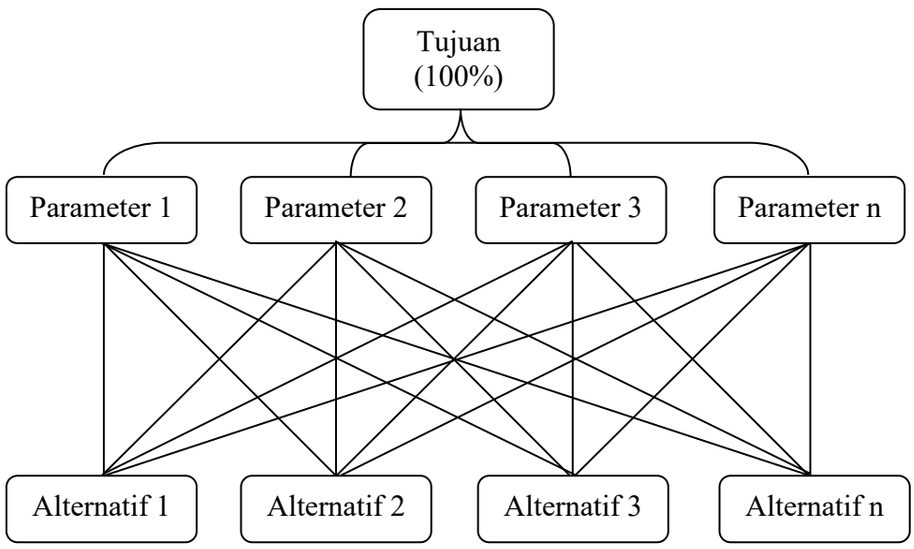

Gambar 2.1. Struktur Hirarki AHP

AHP digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dimulai dengan mendefenisikan permasalahan tersebut secara seksama kemudian menyusunnya ke dalam suatu hirarki. AHP memasukan nilai-nilai pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. Proses ini bergantung pada imajinasi, pengalaman, dan pengetahuan untuk menyusun hirarki suatu permasalahan dan bergantung pada

logika dan pengalaman untuk memberi pertimbangan. Menurut Saaty (Maretta dkk, 2019), prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan AHP, yaitu :

1. Penyusunan Hirarki

Merupakan langkah penyederhanaan masalah ke dalam bagian yang menjadi elemen pokoknya, kemudian ke dalam bagian-bagiannya lagi, dan seterusnya secara hirarki agar lebih jelas, sehingga mempermudah pengambilan keputusan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan tersebut.

2. Menentukan Prioritas

AHP melakukan perbandingan berpasangan (*pairwaise comparison*) antara dua elemen pada tingkat yang sama. Kedua elemen tersebut dibandingkan dengan menimbang tingkat preferensi elemen yang satu terhadap elemen yang lain berdasarkan kriteria tertentu.

3. Konsistensi Logis

Konsistensi logis merupakan prinsip rasional dalam AHP. Konsistensi berarti ada dua hal, yaitu :

a. Pemikiran atau objek yang serupa dikelompokkan menurut homogenitas dan relevansinya
b. Relasi antara objek yang didasarkan pada kriteria tertentu, saling membenarkan secara logis.

Pada penerapan metode AHP yang diutamakan adalah kualitas data dari responden, dan tidak tergantung pada kuantitasnya (Saaty, 1993). Oleh karena itu, penilaian AHP memerlukan para ahli sebagai responden dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif. Para ahli disini merupakan orang-orang

kompeten yang benar-benar menguasai, mempengaruhi pengambilan kebijakan atau benar-benar mengetahui informasi yang dibutuhkan. Untuk jumlah responden dalam metode AHP tidak memiliki perumusan tertentu, namun hanya ada batas minimum yaitu dua orang responden (Saaty, 1993). Penentuan sample dilakukan melalui pengisiian kuisioner. kriteria pemilihan sampel mewakili setiap bidang keahlian dan diprioritaskan kepada pakar yang disyaratkan untuk menggunakan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) cukup beberapa orang (Saaty, 1993). Unsur terpenting dalam AHP adalah perbandingan berpasangan guna untuk menentukan susunan prioritas elemen, dengan diawali menyusun perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) masing-masing elemen. Tingkat kepentingan masing-masing elemen dapat dilihat skala perbandingannya pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tingkat Kepentingan Elemen

No.	Tingkat Kepentingan	Definisi	Keterangan
1	1	Kedua elemen sama penting	Dua elemen mempunyai pengaruh sama besar
2	3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada yang lain	Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu Elemen
3	5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian dengan kuat menyokong satu elemen dibanding elemen lainnya
4	7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlibat dalam kenyataan
5	9	Satu elemen mutlak lebih penting dari elemen lainnya	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang menguatkan
6	2,4,6,8	pertimbangan yang berdekata Nilai-nilai di antara dua	Nilai ini diberikan bila ada dua komponen di antara dua pilihan
7	kebalikan	aij = 1 / aji	Jika untuk aktivitas ke-*i* mendapat suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas ke-*j* maka *j* mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan *i*

Sebagai contoh pada penyusunan perbandingan berpasangan yang membentuk matriks, misalnya kriteria A memiliki beberapa elemen di bawahnya yaitu B_1, BA pada Tabel 3 berikut : $_2$, ..., B_n, contoh matriks berpasangan berdasarkan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Contoh Matriks Berpasangan

A	B1	B2	.....	Bn
B1	1	a12	.....	a1n
B2	a21 = 1 / a12	1	.....	a2n
A	B1	B2	.....	Bn
.....	.....	.....	1	.....
Bn	an1 = 1 / a1n	an2 = 1 / a2n	.....	1

Sebagaimana pada tabel di atas, bahwa elemen kolom sebelah kiri selalu dibandingkan dengan elemen baris dengan demikian ketika elemen baris tampil sebagai elemen kolom maka diberi nilai kebalikannya dan juga sebaliknya. Dalam materiks ini terdapat perbandingan dengan elemen itu sendiri pada diagonal utama dengan nilai 1. Untuk mengetahui tingkat konsistensi responden, metode AHP diharus melakukan perhitungan Indeks Konsistensi (*consistency index/CI*) sebagai berikut:

$$CI = \frac{\lambda maks - n}{n - 1}$$

Setelah diperoleh indeks konsistensi, maka hasilnya dibandingkan dengan Indeks Konsistensi Random (*Random Consistency Index/RI*) untuk setiap *n* objek. Hasil perbandingan antara CI dengan RI disebut dengan nilai Rasio Konsistensi (*Consistency Ratio/CR*).

$$CR = \frac{\mathbf{CI}}{RI}$$

Jika CR <0,1 (10%) maka derajat konsistensi memuaskan dan jika CR > 0,10 maka berarti ada ketidakkonsistenan saat menetapkan skala perbandingan

sepasang kriteria.Random Indeks (RI) matriks berukuran 1 sampai dengan 12 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 *Random* Indeks AHP

A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RI	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48

E. Penelitian Terdahulu

Metode analisis pada penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ilmy dan Budisusanto (2017) dalam Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode AHP (*Analytical Hierarcy Process*). Penelitian ini untuk mengidentifikasi wilayah kumuh dalam rangka pembuatan peta lokasi kawasan kumuh perkotaan. Dalam menganalisis kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan alat analisis AHP (Analytic Hierarchy Process) dengan menentukan bobot tiap kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap identifikasi wilayah permukiman kumuh. Berdasarkan penelitian tersebut didapat hasil kriteria-kriteria yang sangat berpengaruh dalam penentuan identifikasi kawasan permukiman kumuh di wilayah penelitian adalah kriteria sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, cakupan pelayanan jalan lingkungan dan ketidaktersediaan drainase.

Mutaqin, dkk (2019) dalam Prioritas Penentuan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Yang Berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kegiatan dan lokasi skala prioritas berdasarkan 3 pilar pembangunan

berkelanjutan yang dapat mengurangi tingkat kekumuhan yaitu fisik lingkungan, sosial dan ekonomi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian menyebutkan untuk peningkatan kualitas permukiman daerah 29 Ilir adalah faktor pembangunan fisik lingkungan dengan tingkat kepentingan 46,7%, faktor kegiatan sosial dengan tingkat kepentingan 31,2% dan faktor peningkatan ekonomi dengan tingkat kepentingan 22,1%. Masing-masing kegiatan faktor yang menjadi prioritas adalah mengelola sampah rumah tangga sebesar 100%, sarana persampahan sebesar 93,5%, kegiatan gotong royong sebesar 83,6%, drainase sebesar 66,2%, sanitasi sebesar 66,1%, pinjaman modal usaha sebesar 63%, pelatihan dan kewirausahaan sebesar 61% serta santunan bagi masyarakat miskin sebesar 57,9%. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam penentuan prioritas peningkatan kualitas terhadap lingkungan permukiman kumuh, aspek sosial yang berkaitan dengan komitmen masyarakat untuk memelihara lingkungan dalam jangka panjang dan berkelanjutan lebih penting dibandingkan dengan aspek fisik dan aspek ekonomi.

Maretta, dkk (2019) dalam Kajian Lokasi Potensial Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Pesawaran Dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bobot setiap parameter yang digunakan dalam menentukan tingkat potensi suatu lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman dan untuk mengetahui tingkat potensial lahan di Kabupaten Pesawaran untuk pengembangan perumahan dan permukiman dengan menggunakan sistem informasi geografis. Metode yang digunakan untuk

mengetahui parameter paling dominan dalam pemilihan lokasi perumahan adalah dengan pembobotan menggunakan AHP (Analytcal Hierarchy Process). Hasil penelitian dengan perhitungan AHP menunjukan parameter yang paling dominan adalah aksesibilitas. Alasannya, aksesibilitas akan mempengaruhi kemudahan pelayanan transportasi dan keterjangkauan jarak.

Penelitian relevan yang selanjutnya yaitu Haramaini, dkk (2018) dalam Penerapan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Dalam Menentukan Tingkat Kemacetan Lalulintas Di Kecamatan Medan Kota. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat kemacetan jalan yang ada di kecamatan Medan Kota sehingga dapat memilih jalan yang akan dilewati. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Medan Kota yaitu di Jalan SM Raja (Amplas), Jalan SM Raja (Tirtanadi), Jalan Turi dan Jalan Pelangi. Hasil dari penelitian ini adalah terbangunnya sebuah aplikasi untuk mengetahui tingkat kemacetan jalan lalulintas di Kecamatan Medan Kota dengan menggunakan AHP. Penerapan metode AHP dalam menentukan tingkat kemacetan lalulintas di Kecamatan Medan Kota menghasilkan nama jalan yang mengalami tingkat kemacetan tertinggi yaitu pada Jalan SM Raja (Tirtanadi) dan tingkat kemacetan terendah yaitu pada Jalan Turi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar tercapai hasil maksimal. Selain itu metodologi juga merupakan cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun metodologi dalam penelitian ini terdiri dari penentuan lokasi penelitian, penentuan jenis data, penentuan prosedur penelitan dan diagram alir penelitian.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Daerah Permukiman Kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu Daya Murni, Mulya Asri, Pulung Kencana, Panaragan Jaya, Pulung Kencana, Bandar Dewa dan Menggala Mas. Secara administratif Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdiri Dari 9 Kecamatan yang terdiri dari Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Tumijajar, Pagardewa, Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang, Way Kenanga dan Batu Putih. Sedangkan secara georafis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada 04’10”-04’42” LS dan 104’55”-105’20” BT. Berikut merupakan peta administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada gambar 3.1.

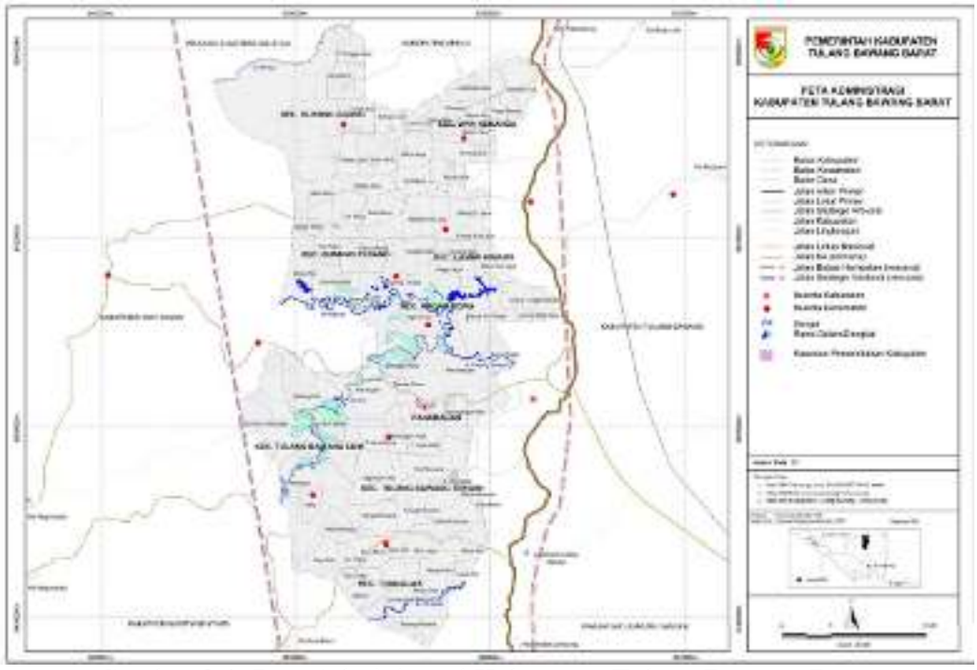

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat

B. Jenis Data

Data yang digunakan untuk menunjang keberhasilan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Data Primer

Proses ini dilakukan dengan wawancara dan pembagian kuisioner dalam menentukan prioritas kriteria permukiman kumuh pada stakeholder dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu responden dianggap sebagai orang yang mengetahui tentang permukiman kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Sekretaris Dinas, Kabid Perencanaan Perumahan Kawasan Permukiman, Kabid Pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi, Kasi Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman, serta para Staf Pelaksana Teknis), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Sekretaris

Dinas, Kabid Perencanaan Bina Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu, Kabid Cipta Karya, Kasi Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan, Kasi Perencanaan, serta para Staf Pelaksana Teknis), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Sekretaris Bappeda, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kabid Perekonomian Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan, Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan, Kasubbid Infrastruktur dan Kewilayahan, serta para Staf Pelaksana Teknis) serta para tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya. Total responden berjumlah 25 orang dengan kriteria responden yaitu memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam bidang permukiman kumuh.

2. Data Sekunder

Proses ini dilakukan dengan cara studi literatur atau kepustakaan yang dilakukan dengan meninjau isi dari literatur yang bersangkutan dengan tema penelitian ini, diantaranya berupa buku, hasil penelitian, dsb.

C. Prosedur Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Mencari latar belakang dari kriteria permukiman kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat

2. Pengumpulan dan pengolahan data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pengamatan lapangan, wawancara dan penyebaran kuisioner. Kuisioner dibuat dengan berdasarkan parameter-parameter analisis yang dibutuhkan, sehingga data yang diperoleh relavan dengan maksud dan tujuan penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan

kepada pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Disperkimta) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terdapat 19 kotak yang akan diisi dengan menentukan pembobotan parameter yang paling penting. Pada tiap kotak, dilakukan pembandingan antar parameter dan diberikan nilai bobot kepentingan 1 sampai dengan 9. Hasil kuesioner kemudian diolah menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Berikut merupakan Pembobotan Kriteria Dan Sub Kriteria Permukiman Kumuh dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pembobotan Kriteria Dan Sub Kriteria Permukiman Kumuh

Kriteria	**Sub kriteria**	**Kode**
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	A1
	Tingkat Kepadatan Bangunan	A2
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Pembangunan	A3
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	A4
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	A5
Kondisi Penyedia Air Minum	Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	A6
	Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum	A7
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	A8
	Ketidaktersediaan Drainase	A9
	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase	A10
	Tidak terpeliharanya drainase	A11
	Kualitas Kontruksi Drainase	A12
Kondisi Pengolahan Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	A13
	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	A14
Kondisi Penglolaan Sampah	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai standar teknis	A15
	Sistem Pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis	A16
	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana	A17
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran	A18
	Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	A19

3. Menganalisis data

Setelah pengumpulan data primer dan sekunder selesai, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process(AHP).* Analisis AHP digunakan untuk menentukan bobot tiap kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap penanganan daerah permukiman kumuh.

4. Kesimpulan

Setelah selesai melakukan analisis data penentuan bobot prioritas menggunakan metode AHP, kemudian ditarik kesimpulan kriteria mana yang paling signifikan berpengaruh terhadap penanganan daerah permukiman kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Diagram Alir Metode Penelitian

Diagram alir metode penelitian merupakan ringkasan dari tahapan proses penelitian yang telah dilakukan. Diagram alir merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana jalannya penelitian dimulai dari awal hingga akhir. Setiap diagram alir harus mempunyai titik awal dan titik akhir (*start and stop*). Diagram alir dibentuk dengan memanfaatkan simbol-simbol tertentu. Berikut merupakan diagram alir metode penelitian dalam penelitian ini seperti terlihat pada gambar 3.2.

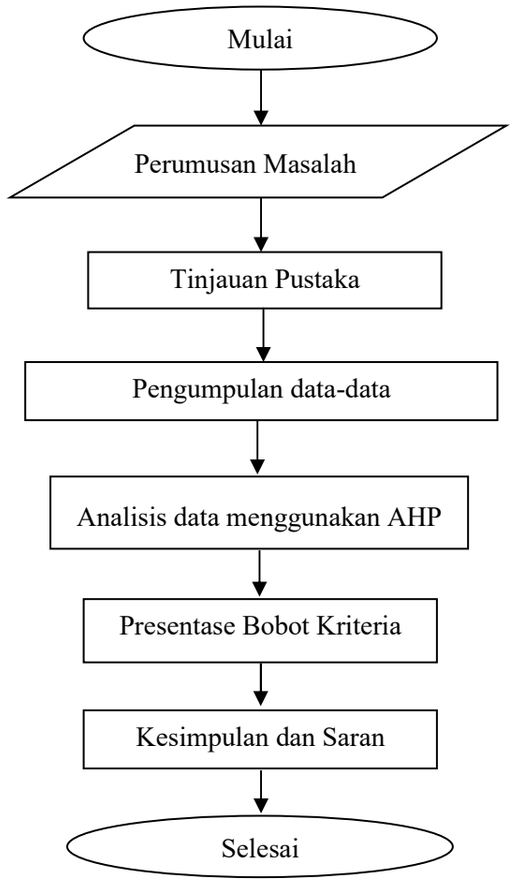

Gambar 3.2 Diagram Alir Metode Penelitian

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) didapat bahwa masing-masing Kriteria Permukiman Kumuh memiliki nilai bobot yang berbeda sehingga dapat ditarik konklusi perangkingan prioritas Kriteria Permukiman Kumuh yang memiliki nilai bobot terbesar adalah Kondisi Drainase Lingkungan diikuti Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Pengelolaan Persampahan, Kondisi Pengelolaan Limbah, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Bangunan Gedung dan Kondisi Proteksi Kebakaran.
2. Terdapat perbedaan sub kriteria prioritas disetiap masing-masing daerah kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada Kelurahan Daya Murni yaitu Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan (0,4146), pada Kelurahan Mulya Asri yaitu Kualitas Konstruksi Drainase (0,2548), pada Kelurahan Panaragan Jaya yaitu Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air (0,1310), pada Tiyuh Pulung Kencana yaitu Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis (0,2623), pada Tiyuh Bandar Dewa yaitu Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum (0,075) serta pada Tiyuh

Menggala Mas yaitu Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis (0,079).

3. Daerah permukiman kumuh yang memiliki nilai prioritas penanganan tertinggi adalah Kelurahan Daya Murni (1,175), diikuti oleh Tiyuh Pulung Kencana (0,844), Kelurahan Mulya Asri (0,765), Kelurahan Panaragan Jaya (0,461), Tiyuh Menggala Mas (0,339) dan Tiyuh Bandar Dewa (0,308).

B. SARAN

Penelitian ini masih memiliki kekurangan terutama terkait parameter yang digunakan, oleh sebab itu terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat diperlukan penanganan permukiman kumuh yang lebih prioritas pada Kelurahan Daya Murni, mengingat Kelurahan Daya Murni merupakan daerah kumuh yang paling tinggi nilai prioritasnya dibandingkan dengan daerah kumuh lainnya. Selain itu, perbedaan prioritas sub kriteria permukiman kumuh pada masing-masing daerah kumuh dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pengentasan daerah permukiman kumuh di masing-masing daerah tersebut.
2. Bagi Masyarakat agar dijadikan pembelajaran dalam rangka menjaga lingkungan sekitar sehingga penanganan daerah kumuh dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
3. Bagi aspek keilmuan, diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan terhadap hubungan kerjasama antara beberapa pihak tertentu seperti Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Pengusaha, Media, dll terhadap penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain itu,

diharapkan pula dilakukan penelitian lanjutan terhadap penanganan permukiman kumuh yang berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditinjau dari faktor sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2021. *Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalama Angka*. 275: 49-50.

Djemabut. B.C. 1977. *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Haramaini, T., Nasution, K. dan Sulaiman, O.K. 2018. *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dalam Menentukan Tingkat Kemacetan Lalulintas Di Kecamatan Medan Kota*. Medan: Jurnal UISU Vol 12 No. 1, Juli 2018, 8-19.

Haryanto, A. 2007. *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Pemukiman Yang Sehat*. Bandung: Jurnal PWK Unisba 7 (2), 11-37.

Hutapea, J. 2012. *Analisis Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kota Medan (Studi Kasus: Kecamatan Medan Belawan)*. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara.

Idris, S.A.L. 2012. *Analisis Perbandingan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dengan Simple Additive Weighting (SAW)*. Gorontalo: Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.

Ilmy, H.F. dan Budisusanto, Y. 2017. *Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarcy Process)*. Surabaya: Jurnal Teknik ITS Vol. 6, No. 1.

Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/56/II.04/HK/TUBABA/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Maharani, D. 2017. *Pemilihan Strategi Kebijakan Transportasi Di Bandar Lampung Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process*. Bandar Lampung: Skripsi Universitas Lampung.

Maretta, N., Dewi, C., Murdapa, F. dan Rahmadi, E. 2019. *Kajian Lokasi Potensial Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Pesawaran Dengan Sistem Informasi Geografis (SIG).* Bandar Lampung:

Jurnal Geofisika Eksplorasi Vol. 5/No.3 November 2019: 185-192 Universitas Lampung.

Mutaqin, Z., Persada, C. dan Suroso, E. 2019. *Prioritas Penentuan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Yang Berkelanjutan.* Bandar Lampung: Jurnal Presipitasi Vol. 16, No. 2, 2019 22-32.

Pahtoni, T.Y., dan Tasrif, E. 2020. *Komparasi Metode Analytical Hierarchy Process Dengan Simple Additive Weighting Dalam Penentuan Prioritas*. Padang: Jurnal Universitas Negeri Padang P-ISSN: 2302-3295, E-ISSN : 2716-3989.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Pramudhita, A.N. 2018. *Komparasi Algoritma Multi Criteria Decision Making Dengan Metode AHP dan SAW*. Malang: Prosiding Politeknik Negeri Malang Vol. 10 No. 01 ISSN: 2581-0049, 85-89

Prihatini, D. 2015. *Strategi Pengembangan Komoditas Sayuran (Dataran Tinggi) Unggulan Di Kawasan Agropolitan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat*. Bandar Lampung: Tesis Universitas Lampung.

Saaty, T.L. 1995. *The Anallic Hierarchy Process*. New York: McGraw-Hill.

Universitas Lampung. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. 76: 13-76

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Wiarni, S., Mononimbar, W. dan Supardjo, S. 2018. *Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Kotamobagu Timur*. Makassar: Jurnal Spasial Universitas Sam Ratulangi Vol 5. No. 1.

Wicaksono, A.P., Syukur, A. dan Suprapedi. 2019. *Komparasi Simple Additive Weighting Dan Analytical Hierarchy Process Terhadap Penentuan Pengelompokan Desa*. Semarang: Jurnal Teknologi Informasi Universitas Dian Nuswantoro Vol. 15 No. 01 ISSN: 1907-3380, 28-44.